

Human Development Index (HDI) Salah Satu Indikator Yang Populer Untuk Mengukur Kinerja Pembangunan Manusia

M. Faqihudin
Progdi Manajemen FE. UPS Tegal
m.faqihudin@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan pembangunan selama ini mengedepankan laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pembangunan memiliki dimensi yang luas dimana manusia merupakan hakekat dari tujuan pembangunan itu. Oleh karena itu diperlukan konsep pembangunan manusia yang elemen-elemennya secara tegas menggaris bawahi sasaran yang ingin dicapai, yaitu hidup sehat dan panjang umur, berpendidikan dan dapat menikmati hidup layak. Elemen – elemen ini yang kemudian menjadi indikator keberhasilan pembangunan manusia yang diukur dengan menggunakan Human Developmen Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). HDI atau IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yang digunakan sebagai indikator yaitu (i) bidang kesehatan : usia hidup (logetivity) ; (ii) bidang pendidikan : pengetahuan (knowledge) ; dan (iii) bidang ekonomi : standar hidup layak (decent living).

Kata Kunci : Tujuan Pembangunan, Pembangunan Manusia, Human Development Index (HDI).

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Tujuan ini dicapai

melalui pembangunan nasional secara bertahap dan berkesinambungan di semua sektor kehidupan.

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional menempati posisi yang sangat strategis bagi kesinambungan dan keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan mengusahakan laju pertumbuhan daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh masing – masing daerah. (Progo Nurdjaman, 2006)

Laju pertumbuhan daerah / pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa saja, karena pembangunan nasional atau daerah itu berdimensi sangat luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi. Manusia seharusnya merupakan hakekat dari tujuan pembangunan, bukan hanya “kue pembangunan” dan ‘pertumbuhan kue’. Sulit dikatakan ada pembangunan bila kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan masih substansial. Oleh karena itu pembangunan pada hakekatnya adalah untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya baik lahir ataupun bathin. (http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia)

Merujuk dari hal tersebut di atas, maka pembangunan manusia merupakan "suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk" melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan. Elemen-elemen pembangunan manusia secara tegas menggaris bawahi sasaran yang ingin dicapai, yaitu hidup sehat dan panjang umur, berpendidikan dan dapat menikmati hidup layak. Ini berarti pembangunan manusia merupakan manifestasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya yang sistematis. (BPS, 2006)

Oleh sebab itu sasaran dasar pembangunan pada akhirnya adalah peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat), meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan ketrampilan) serta penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk hidup layak) untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang selanjutnya akan menjadi indikator keberhasilan pembangunan manusia yang diukur dengan menggunakan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

B. KONSEP PEMBANGUNAN MANUSIA (*HUMAN DEVELOPMENT*)

Sumberdaya adalah fungsi operasional dari suatu benda atau substansi yang terintegrasi secara dinamis kedalam faktor-faktor produksi dalam proses menghasilkan suatu produksi berupa barang dan jasa (Badandiklat Depertan, 1999 dalam SPSDM Kab. Brebes). Kemudian, pembangunan / pengembangan sumberdaya manusia (SDM) diartikan sebagai pemekaran potensi manusia seoptimal mungkin untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia itu sendiri. SDM mempunyai peranan yang cukup penting, yaitu berperan dalam menggali dan mengembangkan sumberdaya potensial menjadi sumberdaya riil, dan berperan dalam menintegrasikan sumberdaya dalam ratio/perbandingan terbaik dalam upaya menghasilkan barang dan atau jasa.

Dalam perspektif *the United Nation Development Program (UNDP)* pembangunan manusia (*human development*) dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choice of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut (UNDP, 1990 dalam BPS Kota Tegal). Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf / tingkat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan sekaligus sebagai pemanfaatan (*utilization*) kemampuan / keterampilan tersebut.

Konsep pembangunan di atas jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan konsep pertumbuhan ekonomi yang hanya menekankan pada pertumbuhan kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat atau pengembangan sumber daya manusia. Konsep pembangunan manusia UNDP mengandung empat unsur yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan pembangunan tentang penduduk (*of people*), untuk penduduk (*for people*) dan oleh penduduk (*by people*) dimana :

1. *Tentang Penduduk (of people)*, adalah pemberdayaan penduduk diupayakan melalui investasi bidang – bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya.
2. *Untuk Penduduk (for people)*, adalah pemberdayaan penduduk yang dapat diupayakan melalui program penciptaan lapangan pekerjaan dan memperluas kesempatan berusaha (dengan cara memperluas kegiatan ekonomi suatu wilayah).
3. *Oleh Penduduk (by people)*, adalah pemberdayaan penduduk yang dapat meningkatkan harkat dan martabat melalui peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam bidang politik dan proses pembangunan.

Untuk dapat mengetahui sudah sejauhmana pembangunan telah dilaksanakan dan seberapa jauh pembangunan telah dicapai diperlukan suatu alat ukur yang dapat dipakai acuan secara riil, sehingga nantinya dapat dilakukan analisa secara berkesinambungan dan dalam skop lebih luas dapat diperbandingkan dengan wilayah lain.

C. INDIKATOR PEMBANGUNAN MANUSIA

Untuk dapat melihat peran dari pembangunan manusia tersebut, maka perlu dilihat terlebih dahulu berbagai indikator yang terkait. Indikator – indikator

pembangunan manusia pada dasarnya mencakup seluruh masalah pembangunan manusia secara konseptual / empirik diketahui saling mempengaruhi atau dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh satu atau lebih komponen – komponen Indeks Pembangunan Manusia lainnya. Indikator dimaksud antara lain meliputi : (SPSDM Kab. Brebes)

1. Bidang kesehatan

Pada bidang ini yang akan dilihat dan digambarkan adalah : (i) masalah pelayanan kesehatan dengan indikator % persalinan balita dibantu tenaga medis, banyaknya penduduk per Puskesmas, banyaknya dokter per 10.000 penduduk.; (ii) masalah kelangsungan hidup dengan indikator angka kematian bayi, angka kematian balita, % balita dengan status gizi, % balita diimunisasi; (iii) masalah status kesehatan dengan indikator % penduduk sakit, Rata-rata lama sakit.

2. Bidang Pendidikan

Pada bidang ini yang akan dilihat dan digambarkan adalah : (i) masalah partisipasi sekolah dengan indikator angka partisipasi murni : SD (7-12 tahun), SLTP (13-15 tahun), SMU (16-18 tahun) ; (ii) masalah pelayanan pendidikan dengan indikator rasio penduduk usia sekolah - bangku sekolah, rasio murid sekolah, rasio murid - kelas, dan rasio murid guru.

3. Bidang Ketenagakerjaan

Pada bidang ini yang akan dilihat dan digambarkan adalah : (i) masalah partisipasi dan kesempatan kerja dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat kesempatan kerja, % penduduk bekerja menurut sektor ekonomi, sektor pertanian /primer, sektor industri/sekunder, sektor jasa/tersier ; (ii) masalah pengangguran dengan indikator angka pengangguran terbuka, % yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu

D. INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* adalah merupakan salah satu alat ukur yang dapat merefleksikan status pembangunan manusia. *United Nations Programme (UNDP)* sejak tahun 1990 menggunakan IPM untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara dan mempublikasikannya dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*.

IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yang digunakan sebagai indikator yaitu (i) bidang kesehatan : usia hidup (logetivity) ; (ii) bidang pendidikan : pengetahuan (knowledge) ; dan (iii) bidang ekonomi : standar hidup layak (decent living).

1. Usia Hidup

Pembangunan Manusia , atau upaya untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, harus terlebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai usia hidup yang panjang dan sehat. Sebenarnya banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur usia hidup, tetapi dengan pertimbangan ketersediaan data secara global dipilih indikator *angka harapan hidup* waktu lahir (*life expantancy at birth*) yang bisa dinotasikan dengan *eo*. Angka kematian bayi (IMR) tidak digunakan untuk keperluan itu karena indikator itu dinilai tidak peka bagi negara-negara industri yang telah maju. Seperti halnya IMR, *eo* sebenarnya mereflesikan seluruh tingkat pembangunan dan bukan hanya bidang kesehatan.

Dalam suatu negara yang tidak memiliki sistem vital registrasi yang baik seperti Indonesia *eo* dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang dilahirkan masih hidup. Prosedur perhitungan *eo* dengan metode itu hanya efesien jika dilakukan dengan dengan

menggunakan Mortpak Lite atau software lainnya. Sebagai catatan, *eo* yang diperoleh dengan metode tidak langsung merujuk pada keadaan 3-4 tahun dari tahun survei.

Sejauh ini ada tiga macam data yang dapat digunakan untuk memperoleh dua macam data dasar tersebut yaitu Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Periodisasi SP dan Supas adalah 10 tahunan, sedangkan periodisasi adalah tahunan. Sebagai catatan hasil perhitungan *eo* untuk tingkat kabupaten/kotanya dari sumber-sumber data tersebut (khususnya Susenas) selalu harus dievaluasi secara cermat sebelum digunakan.

2. Pengetahuan

Selain usia hidup, pengetahuan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Dengan pertimbangan ketersediaan data, pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu *angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah*. Sebagai catatan UNDP dalam publikasi tahunan HDR sejak 1995 mengganti rata-rata lama sekolah dengan partisipasi sekolah dasar, menengah dan tinggi sekalipun diakui bahwa indikator yang kedua diakui kurang sesuai sebagai indikator dampak. Penggantian diakui semata-mata karena sulit memperoleh data rata-rata lama sekolah secara global, suatu kesulitan yang bagi keperluan internal Indonesia dapat diatasi dengan tersedianya data Susenas Kor.

Indikator angka melek huruf dapat diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis. Pengolahannya dapat dilakukan dengan menjumlahkan kasus berkode 1 (dapat membaca dan menulis) dan berkode 2 (dapat membaca dan menulis huruf lainnya), kemudian membandingkannya dengan jumlah seluruh kasus. Seperti halnya angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dihitung dengan pengolahan tagulasi data Susenas Kor. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan data variabel secara simultan,

yaitu: tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Perhitungan rata-rata lama sekolah dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal dihitung lama sekolah untuk masing-masing individu dengan menggunakan pola hubungan antar variabel-variabel tersebut. Pada tahap berikutnya dihitung rata-rata lama sekolah agregat.

3. Standar Hidup Layak

Selain manusia hidup, dan pengetahuan unsur dasar pembangunan manusia yang diakui secara luas adalah standar hidup layak. Banyak indikator alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur unsur ini. Dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara internasional UNDP memilih GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai indikator standar hidup layak.

Berbeda dengan indikator untuk kedua unsur IPM lainnya, indikator standar hidup layak diakui sebagai indikator input, bukan indikator dampak, sehingga sebenarnya kurang sesuai sebagai unsur IPM. Walaupun demikian UNDP tetap mempertahankannya karena indikator lain yang sesuai tidak tersedia secara global. Selain itu dipertahankannya indikator inipun juga merupakan argumen bahwa selain usia hidup dan mengetahui masih banyak variabel input yang pantas diperhitungkan dalam perhitungan IPM. Dilemanya, memasukan banyak variabel atau indikator akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak sederhana. Dengan alasan itu maka GDP riil per kapita yang telah disesuaikan dianggap mewakili indikator input IPM lainnya.

Untuk keperluan perhitungan IPM propinsi atau kabupaten/kodya data dasar PDRB perkapita tidak dapat digunakan untuk mengukur standar hidup layak karena bukan ukuran ukuran yang peka untuk mengukur data beli

penduduk (yang merupakan fokus IPM). Sebagai penggantinya digunakan *konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan* untuk keperluan yang sama. Sumber data yang digunakan adalah Susenas (Kor dan Modul). Berikut ini adalah data basis indikator IPM.

Tabel 1
Data Basis Indikator Indeks Pembangunan Manusia

INDIKATOR	SUMBER DATA
A. Kependudukan	
01. Jumlah Penduduk	Susenas
02. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Setahun	Susenas
03. Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>)	Susenas
04. Angka ketergantungan	Susenas
B. Pendidikan	
05. Rata – rata lama sekolah	Susenas
06. Angka melek huruf	Susenas
07. Angka partisipasi murni SD (5 – 12 th)	Susenas
08. Angka partisipasi murna SLTP (13-15 th)	Susenas
09. Angka partisipasi SLTA (16 – 18 th)	Susenas
10. % penduduk usia 15 th keatas tamat SLTP	Susenas
11. Murid per bangku sekolah	Diknas
12. Jumlah penduduk usia sekolah	Susenas

C. Kesehatan	
13. Angka kematian bayi	Susenas
14. % penolong persalinan tenaga medis	Susenas
15. % penolong persalinan bukan tenaga medis	Susenas
16. Rata – rata lama sakit	Susenas
17. Angka kesakitan	Susenas
18. Angka kematian balita	Susenas
19. Jumlah Puskesmas per 1000 penduduk	Dinas Kesehatan
20. jumlah dokter per 1000 penduduk	Dinas Kesehatan
21. Dokter per Puskesmas	Dinas Kesehatan
22. Pemeriksaan kesehatan pra kelahiran	Dinas Kesehatan
23. Jumlah Posyandu	Dinas Kesehatan
24. Jumlah bidan desa	Dinas Kesehatan
25. Jumlah pondok persalinan desa (polindes)	Dinas Kesehatan
26. Jumlah Pos Obat Desa (POD)	Dinas Kesehatan
27. Cakupan Jamkesmas	Dinas Kesehatan
D. Ketenagakerjaan	
28. Partisipasi angkatan kerja	Susenas
29. Angka pengangguran terbuka	Susenas
30. % pekerja < 35 jam per minggu	Susenas
31. % pekerja sektor pertanian	Susenas
32. % pekerja sektor jasa	Susenas

33. % buruh industri	Susenas
34. % berusaha dibantu pekerja tidak tetap	Susenas
35. % pekerja dengan buruh tetap	Susenas
36. % buruh atau karyawan	Susenas
37. % pekerja tidak dibayar	Susenas
E. Perumahan	
38. % rumah tangga dengan lantai tanah	Susenas
39. % rumah tangga beratap layak	Susenas
40. % rumah tangga dengan dinding tembok	Susenas
41. % rumah tangga dengan penerangan listrik	Susenas
42. % rumah tangga dengan air minum leding	Susenas
43. % rumah tangga dengan air minum bersih	Susenas
44. % rumah tangga dengan tangki septik	Susenas
F. Ekonomi	
45. % PDRB sektor pertanian	PDRB
- Harga berlaku	PDRB
- Harga konstan	PDRB
46. % PDRB sektor industri	PDRB
- Harga berlaku	PDRB
- Harga konstan	PDRB
47. % PDRB sektor jasa – jasa	PDRB
- Harga berlaku	PDRB

- Harga konstan	PDRB
G. Sosial Budaya	
48. % Penduduk nonton TV	Susenas
49. % Penduduk mendengarkan radio	Susenas
50. % Penduduk membaca surat kabar	Susenas
51. % Penduduk berdarma wisata	Susenas
52. % Penduduk membaca kitab suci/artikel agama	Susenas

Sumber : BPS Kota Tegal

E. TAHAPAN PENGHITUNGAN IPM

1. Tahapan pertama

Tahapan pertama perhitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM (eo, Pengetahuan, dan Standar Hidup Layak) dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Indeks } (X_i) = (X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$$

Dimana

X_i : Indikator komponen Indeks Pembangunan Manusia ke- i ($i = 1, 2, 3$)

$X_{\min}$: Nilai minimum X_i (lihat Tabel 2.2)

$X_{\max}$: Nilai maksimum X_i (lihat Tabel 2.2)

Persamaan (1) akan menghasilkan $0 < X_i < 1$; untuk mempermudah cara membaca skala dinyatakan dalam 100 (persamaan dikalikan 100, sehingga $0 < X_i < 100$).

Tabel 2
Nilai Maksimum dan Nilai Minimum
Indikator Komponen IPM

Indikator	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan
1	2	3	4
Angka Harapa Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang disesuaikan	732 720	300 000	UNDP menggunakan GDP per kapita riil yang disesuaikan

Sumber : SPSDM Kab. Brebes

2. Tahapan kedua

Tahapan kedua perhitungan IPM adalah menghitung rata-rata sederhana dari masing-masing indeks X_i dengan rumus :

$$\begin{aligned}\text{Indeks Pembangunan Manusia} &= 1/3 \sum X_i \\ &= 1/3[X(1)+X(2)+X(3)]\end{aligned}$$

dimana

$X(1)$ = Indeks Angka Harapan Hidup

$X(2)$ = $2/3$ (Indeks Melek Huruf) + $1/3$ (Indeks Rata-rata Lama Sekolah)

$X(3)$ = Indeks Konsumsi Per Kapita yang disesuaikan

Sebagai ilustrasi perhitungan dapat diambil kasus suatu Kabupaten tahun 1998 yang memiliki data sebagai berikut (data dari BPS- Prop./hasil SUSENAS) :

- Angka harapan hidup : 60,5 tahun
- Angka melek huruf : 83,8 persen
- Rata lama sekolah : 4,7 tahun
- Konsumsi per kapita riil yang disesuaikan : Rp 548.400,-

Berdasarkan data tersebut maka dapat dihitung indeks masing-masing komponen sebagai berikut :

- Indeks harga harapan hidup : $(60,5 - 25)/(85 - 25) \times 100 = 59,17$
- Indeks angka melek huruf : $(83,8 - 0)/(100 - 0) \times 100 = 83,8$
- Indeks rata-rata lama sekolah : $(4,7 - 0)/(15 - 0) \times 100 = 31,33$
- Indeks pendidikan : $(2/3 \times 83,8) + (1/3 \times 31,33) = \mathbf{66,30}$
- Indeks Konsumsi per kapita riil yang disesuaikan :

$$(548.400 - 300.000)/(733.720 - 300.000) \times 100 = 57,27$$

IPM dapat dihitung sebagai berikut :

$$IPM = 1/3 (59,17 + \mathbf{66,30} + 57,27) = 60,91$$

Jadi IPM Kabupaten tersebut pada tahun 1998 adalah **60,9**

Angka IPM dikategorikan menjadi tinggi, menengah dan rendah, UNDP dalam pemeringkatan negara menurut IPMnya dengan rentang tinggi (81,00 – 100), menengah (51,00 – 80,00) dan rendah (0,00 – 50,00).

Besaran IPM ini selain sebagai tolok ukur keberhasilan di daerah yang bersangkutan, dapat juga diperbandingkan dengan daerah sekitar, sehingga ke depan dapat digunakan untuk kerjasama program yang saling mendukung sebagai contoh adalah perbandingan IPM di eks Karesidenan Pekalongan berikut ini:

Tabel 3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Se Eks Wilayah Karesidenan
Pekalongan Tahun 2002 s/d 2003

No	Kab. / Kota	2002		2003	
		IPM	R	IPM	R
1	Kab. Batang	65,2	3	70,60	3
2	Kab. Pekalongan	63,6	4	69,22	4
3	Kab. Pemalang	62,1	6	67,01	6
4	Kab. Tegal	63,1	5	68,42	5
5	Kab. Brebes	61,1	7	65,97	7
6	Kota Pekalongan	68,1	2	74,59	1
7	Kota Tegal	68,4	1	72,20	2

Sumber : Laporan akhir evaluasi dan analisis keberhasilan pembangunan manusia di Jawa Tengan tahun 2003 (diolah) dan BPS Kab. Brebes.(dalam SPSDM Kab. Brebes)

F. KESIMPULAN

1. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional selama ini hanya diarahkan untuk mengembangkan daerah dan mengusahakan laju pertumbuhan. Pembangunan nasional atau daerah itu berdimensi sangat luas lebih dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi dimana manusia seharusnya merupakan hakekat dari tujuan pembangunan itu sendiri.
2. Diperlukan konsep pembangunan yang jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan konsep pertumbuhan ekonomi yang hanya menekankan pada pertumbuhan kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat atau pengembangan sumber daya manusia. Konsep pembangunan manusia UNDP mengandung empat unsur yang melibatkan manusia yaitu produktivitas (

productivity), pemerataan pembangunan tentang penduduk (*of people*), untuk penduduk (*for people*) dan oleh penduduk (*by people*).

3. Sasaran dasar pembangunan pada dasarnya adalah peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat), meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan ketrampilan) serta penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk hidup layak) untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang selanjutnya akan menjadi indikator keberhasilan pembangunan manusia yang diukur dengan menggunakan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
4. HDI atau IPM merupakan muara dari keberhasilan pembangunan karena memuat semua data basis indikator keberhasilan pembangunan. Besaran IPM ini selain sebagai tolok ukur keberhasilan di daerah yang bersangkutan yang dapat dijadikan acuan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang, dapat juga diperbandingkan dengan daerah sekitar, sehingga dimungkinkan digunakan untuk kerjasama program yang saling mendukung.

REFERENSI

BPS Pusat. *Indeks Pembangunan Manusia 2006*

BPS Kota Tegal. *Indeks Pembangunan Manusia Kota Tegal*

Bappeda Kota Tegal. *Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Tegal*

Bappeda Kab. Brebes. *Situasi Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Brebes*

Djamin, Zulkarnaen.1993. *Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta : LPFE UI.

Nurdjaman, Progo. 2006. *Pembangunan Potensi Wilayah Berbasis Pendidikan*. Disampaikan pada Seminar Nasional Pembangunan Potensi Wilayah Berbasis Pendidikan, 1 April 2006 di Pemkot Tegal.

Sukirno, Sadono . 1992. *Ekonomi Pembangunan* . Jakarta : Bima Grafika.

< http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia > 25/09/09